

KIA9_AKPM_075

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dewi Arun Sari¹⁾, Murtanto²⁾

^{1,2} Universitas Trisakti Jakarta
email: arunsari07@gmail.com

Abstract

The study aims at analyzing the factors that influence the financial report quality of the National Agency of Drug and Food Control. The analysis in the study is performed by testing the influence of internal control system and information technology use toward the financial report quality of the Agency with the agency accounting system officer competence as the moderating variable. Then, the data for the study are gathered by distributing questionnaires to 43 respondents who work as the institution accounting system officer within the Agency. After the data have been gathered, the data are analyzed by using the moderating regression analysis method.

The results of the study show that the internal control system and the information technology use have positive impact toward the financial report quality of BPOM. Interestingly, the institution accounting system officer competence strengthens the influence of information technology use on the financial report quality of the Agency. On the contrary, the institution accounting system officer competence does not strengthen the influence of the internal control system toward the financial report quality of the Agency.

Keywords: *Financial Report Quality, Human Resources Competence, Information Technology Use, Internal Control System*

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Meningkatnya tuntutan masyarakat kepada penyelenggara negara untuk memberikan keterbukaan informasi publik, mendorong pemerintah pusat dan daerah melakukan penguatan akuntabilitas kinerja. Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang bertujuan memperbaiki tata laksana pemerintahan. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHPLKPP) tahun 2020 yang diterbitkan BPK terhadap 87 LKKL kualitasnya semakin baik. Terdapat 85 LKKL memperoleh predikat WTP, dan 2 LKKLWDP. Meskipun sudah banyak instansi pemerintah yang memperoleh opini WTP, namun masih banyak ditemukan sejumlah permasalahan dalam LKKL tahun 2020 oleh BPK seperti sisa uang persediaan tidak disetor maupun terlambat setor, pengelolaan persediaan belum memadai, pengendalian terhadap pengelolaan aset tetap yang tidak efektif, dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban belanja belum optimal sesuai ketentuan. Laporan keuangan pemerintah menjadi salah satu instrumen dalam pengambilan kebijakan publik oleh pimpinan instansi dan pemangku kepentingan. Sehingga untuk kepentingan perencanaan, pengendalian, maupun pengambilan keputusan setiap instansi pemerintah dituntut untuk memperhatikan kualitas dari informasi yang tercantum di LKKL. Informasi akuntansi yang ada dalam laporan keuangan pemerintah wajib memiliki karakteristik

tertentu agar memenuhi kualitas yang ditetapkan PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan salah satu lembaga negara dengan salah satu kewajiban melakukan kegiatan akuntansi serta pembuatan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Berdasarkan Laporan Kinerja selama tahun 2016-2020 Laporan Keuangan BPOM telah mendapatkan opini WTP dari BPK. Meskipun laporan keuangan mendapatkan opini WTP, namun dalam audit BPK atas laporan keuangan BPOM tahun 2020 masih terdapat banyak temuan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti. Berdasarkan laporan internal BPOM temuan pemeriksaan BPK tahun 2020 yaitu pencatatan masih terdapat kesalahan, pengelolaan PNBK belum optimal, kesalahan penganggaran dan realisasi belanja barang, pengelolaan keuangan oleh bendahara pengeluaran belum tertib, dan penatausahaan persediaan dan pengelolaan aset belum tertib dan memadai. Kesalahan-kesalahan tersebut tentunya mempengaruhi kualitas informasi yang dihasilkan laporan keuangan dan mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

Peran sistem pengendalian internal (SPI) sangat penting sebagai petunjuk operasional dalam pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan agar data informasi dapat diandalkan. SPI juga digunakan untuk menentukan luas ruang lingkup pemeriksaan BPK (Prastiwi & Mimba, 2018). SPI merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan, penelitian Akbariah dan Suratno (2018) menemukan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama juga ditemukan dalam penelitian Saraswati dan Budiasih (2019).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah pemakaian perangkat komputer, *software*, *database*, jaringan, dan jenis teknologi informasi lainnya dengan sebaik-baiknya Wilkinson (2000) dalam Tambingon, dkk (2018). Pemanfaatan teknologi meliputi pengolahan data elektronik dan informasi, sistem manajemen, dan tata kelola. Pemanfaatan teknologi informasi ditujukan agar pelayanan publik dengan mudah diakses masyarakat. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran negara tunduk pada PMK No.215/PMK.05/2016 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Penyusunan konsolidasi LKKL BPOM dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi. Pada masa pandemi Covid-19 penyusunan konsolidasi LKKL BPOM yang sebelumnya dilakukan dalam forum bimbingan teknis secara langsung oleh Biro Perencanaan dan Keuangan kepada seluruh satuan kerja Pusat dan 33 Balai Besar/Balai POM, saat ini dilakukan melalui daring sehingga peran teknologi informasi semakin penting. Kendala teknis dari penggunaan TI sering terjadi sehingga menghambat proses bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan secara online. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu sistem yang dibuat untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan, yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data (Romney & Steinbart, 2019). Penelitian Budiono, dkk (2018) yang menemukan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian Tampubolon dan Ahmad (2019) menghasilkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Efektifitas pemanfaatan teknologi informasi perlu didukung oleh pegawai yang kompeten. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang terstandar. Petugas SAI pada lembaga pemerintah tidak hanya bertugas dalam memasukan data namun juga diharapkan dapat menginterpretasikan data keuangan dan memahami SAP. Berdasarkan data Laporan Kinerja BPOM tahun 2020 diketahui pegawai di BPOM didominasi oleh sumber daya manusia berlatar belakang pendidikan profesi (apoteker dan dokter) sebanyak 35,69% atau 1.699 orang. Komposisi pegawai lainnya yaitu jenjang S1 sebanyak 33,06% (1.574 orang), jenjang S2 8% (394 orang), jenjang S3 0,13 (6 orang), dan non-sarjana 10,88% (518 orang). Jumlah kebutuhan pegawai baik pengelola

anggaran maupun posisi lainnya secara ideal belum dapat terpenuhi. Hal tersebut didukung dengan fakta setiap tahun melakukan pengajuan kebutuhan pegawai untuk formasi CPNS baru. Fenomena yang masih terjadi di tingkat satuan kerja adalah keterbatasan pegawai dengan latar belakang akuntansi menyebabkan di beberapa satuan kerja penyusunan laporan keuangan ditugaskan kepada pegawai dengan latar belakang keilmuan selain akuntansi. Nirwana dan Haliah (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian Akbariah dan Suratmi (2018) juga menghasilkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka penelitian bertujuan menguji pengaruh sistem pengendalian internal dan pemanfaat teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BPOM dengan kompetensi petugas SAI sebagai pemoderasi.

RUMUSAN MASALAH

1. Apakah sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah?
3. Apakah kompetensi petugas SAI memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?
4. Apakah kompetensi petugas SAI memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan menguji dan memberikan bukti empiris tentang:

1. Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
3. Peran kompetensi petugas SAI memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
4. Peran kompetensi petugas SAI memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

TELAAH PUSTAKA

TEORI AGENSI

Teori agensi digunakan untuk memahami hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang meminta atau mempekerjakan agen untuk melakukan pengelolaan sumber daya organisasi serta mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan, sehingga agen harus bertanggung jawab atas pekerjaannya dan berhak mendapatkan imbalan (Rankin, Ferlauto, McGowan, & McGowan, 2018). Berdasarkan Mardiasmo (2018) organisasi sektor publik termasuk lembaga pemerintah memiliki peran sebagai agen yang dituntut melaksanakan akuntabilitas publik. Mardiasmo (2018) memaparkan agen berkewajiban mempertanggungjawabkan segala aktifitas pengelolaan sumberdaya kepada principal dengan menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab agen.

KUALITAS LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, mengatur laporan keuangan disusun sesuai pedoman serta memuat mengenai status keuangan dan aktivitas akuntansi yang

dilakukan oleh organisasi pelapor. Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 menjelaskan:

“Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang kondisi keuangan pemerintah”.

Kualitas dari laporan keuangan pemerintah tergantung pada ciri-ciri khusus kualitatif dan pengungkapan informasi finansial yang wajar dan komprehensif. Dijelaskan dalam SAP bahwa karakteristik kualitatif tersebut merupakan indikator yang wajib terimplementasi dalam informasi akuntansi untuk mewujudkan tujuannya.

a. Relevan

Apabila laporan keuangan memiliki informasi yang membantu pemakainya melakukan evaluasi peristiwa lampau, memproyeksikan masa depan, dan dapat memverifikasi kebenaran hasil evaluasi sehingga mempengaruhi pembuatan keputusan maka disebut relevan.

b. Andal

Dikatakan andal berdasarkan SAP jika informasi disajikan dengan jujur, yaitu dibuat tanpa adanya kebohongan dan wajar serta mampu mewakili transaksi dan peristiwa akuntansi yang terjadi. Mampu diverifikasi atau diuji, jika ada pihak yang berbeda melakukan beberapa pengujian hasilnya masih menunjukkan kesimpulan yang tidak berbeda.

c. Mampu dibandingkan

Keterbandingan yang dimaksud merupakan kualitas informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kualitas hubungan informasi laporan keuangan antar periode maupun dengan entitas sejenisnya.

d. Mudah dipahami

Laporan keuangan entitas sektor publik harus menyajikan informasi dengan cara yang menanggapi kebutuhan dan basis pengetahuan pengguna, serta sifat informasi yang disajikan.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)* (2013) dalam Lathifah (2021) diartikan sebagai suatu kebijakan atau prosedur untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen atau manajer bahwa perusahaan akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan:

“Sistem pengendalian intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Unsur-unsur dalam SPIP merupakan adopsi dari formulasi SPI dari *COSO* yang terdiri dari:

- A. Lingkungan pengendalian, merupakan serangkaian tindakan, kebijakan, prosedur yang mencerminkan perilaku dari pimpinan organisasi terhadap pengendalian internal di unit kerjanya masing-masing dan pentingnya pengendalian internal.
- B. Penilaian risiko, yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
- C. Kegiatan pengendalian, dilakukan setelah penilaian risiko dilakukan untuk mengatasi risiko-risiko yang ada.

- D. Informasi dan komunikasi, dalam penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi perlu dikelola dan yang dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif terutama yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan organisasi.
- E. Pemantauan pengendalian intern, unsur ini merupakan proses penilaian atas mutu kinerja SPI dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kementerian Keuangan telah menetapkan penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi (SAI) yang diatur dalam PMK nomor 215/PMK.05/2016 disebutkan

“SAI merupakan rangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi, mulai dari pendataan, pencatatan, dan mengikhtisarkan hingga pelaporan status keuangan dan operasional keuangan instansi pemerintah.” Menurut Warsita (2008) dalam Budiono, dkk (2018), teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, userware*) sistem dan metode untuk memproses data sehingga menjadi informasi yang bermakna. Melalui informasi tersebut, bisa ditarik suatu kesimpulan penggunaan TI yang terbaik dapat membantu pekerjaan dan meminimalkan tingkat kesalahan.

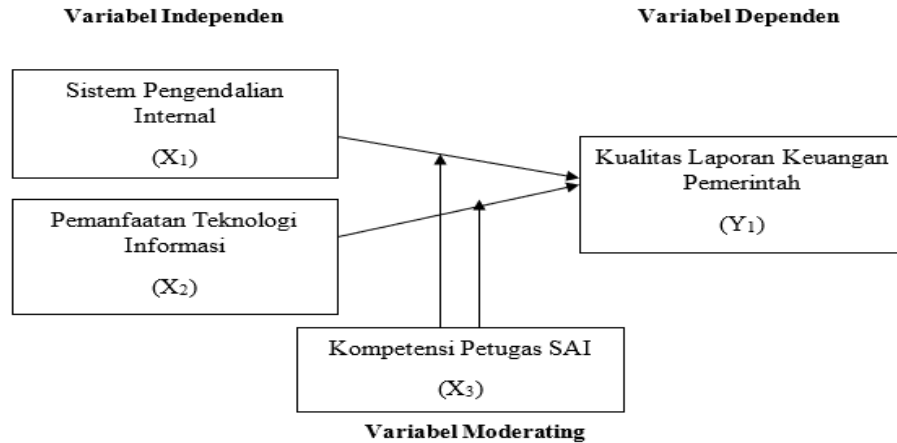
KOMPETENSI PETUGAS SAI

Kompetensi dapat dipahami sebagai kombinasi keterampilan, atribut pribadi, dan pengetahuan yang tercermin dari perilaku kinerja yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi (Bukit, Malusa, & Rahmat, 2017). Menurut Spencer dan Spencer (1993) dalam Bukit, dkk (2017) kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam bekerja. Menurut Stephen Robbin (2007) dalam Akbariah dan Suratno (2018), kompetensi adalah kemampuan individu dalam menyelesaikan berbagai tugas dalam bekerja.

Menurut Busro (2018) kompetensi dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *soft competency* dan *hard competency*. Kompetensi juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki (Busro, 2018).

KERANGKA KONSEPTUAL

Berdasarkan uraian latar belakang, variabel-variabel yang digunakan, serta dukungan dari hasil penelitian terdahulu untuk menganalisis korelasi variabel independen dan variabel dependen yang akan diteliti, kerangka penelitian dijelaskan pada gambar:



Gambar 1.
Kerangka Konseptual

HIPOTESIS

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Sistem pengendalian internal merupakan komponen terintegrasi dari keseluruhan tata kelola organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan operasional organisasi sehingga tujuan dari organisasi dapat terwujud. Penelitian terdahulu yang dilakukan Akbariah dan Suratno (2018) memperlihatkan kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal. Hasil yang selaras juga ditunjukkan penelitian dari Saraswati dan Budiasih (2019) serta Kewo dan Afiah (2017) selain berpengaruh signifikan juga menunjukkan arah yang positif. Penjelasan dan uraian tersebut menjadi dasar peneliti mengajukan hipotesis:

H_1 : Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Transformasi digital yang berkembang pesat saat ini membawa perubahan dan evolusi terstruktur, sehingga membuat perubahan besar pada kualitas pemrosesan data termasuk dalam bidang administrasi serta keuangan (Abbaszadeh, Salehi, & Faiz, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi mendukung percepatan penyusunan laporan keuangan secara online dan terintegrasi. Hasil dari penelitian Budiono,dkk (2018) , Sundari dan Mulyadi (2018) adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penjelasan dan uraian tersebut menjadi dasar peneliti mengajukan hipotesis:

H_2 : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

3. Kompetensi Petugas SAI Memoderasi Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dengan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Kualitas pegawai memiliki peran untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi, sehingga kompetensi setiap pegawai memegang peranan penting dalam menjalankan bisnis proses organisasi (Bukit, Malusa, & Rahmat, 2017). Riset Nirwana dan Haliah (2018) menemukan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, selanjutnya kualitas dari laporan keuangan tersebut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah secara signifikan. Sejalan dengan penelitian riset Akbariah dan Suratno (2018), Tampubolon dan Ahmad (2019) terkait dengan pengelolaan APBN dan pemahaman akuntansi penyusunan LKKL, riset-riset tersebut menghasilkan kompetensi pegawai signifikan mempengaruhi

kualitas dari laporan keuangan pemerintah. Uraian tersebut mendasari peneliti untuk mengajukan hipotesis:

H₃ : Kompetensi petugas SAI memperkuat pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

4. Kompetensi Petugas SAI Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan Kualitas Laporan Keuangan

Sumber daya manusia merupakan aset bagi suatu institusi, pengembangan kompetensi akan mempengaruhi performa kinerja dari pegawai (Setiawan, Mulyani, Sueb, & Winarningsih, 2021). Transformasi digital dalam bidang keuangan yang berkembang saat ini perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas SDM sebagai *user* untuk dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi. Penelitian Setiawan, dkk (2021), Nirwana dan Haliah (2018), Saraswati dan Budiasih (2019) menghasilkan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat dikatakan jika petugas penyusun laporan keuangan kompeten dan memahami prosedur serta bisnis proses penyusunan laporan keuangan maka meningkatkan keandalan informasi akuntansi. Budiono, dkk (2018) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan. Triwahyudi (2020) dalam risetnya menemukan kompetensi pegawai dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud melalui kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan dan uraian peneliti mengajukan hipotesis:

H₄ : Kompetensi petugas SAI memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis pengujian hipotesis, yaitu menerangkan hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat dan diawali dengan mengajukan hipotesis. Tujuannya untuk menguji hubungan pengaruh sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel terikat kualitas laporan keuangan pemerintah. Serta menguji kompetensi petugas SAI sebagai pemoderasi dalam mempengaruhi hubungan variabel bebas dengan variabel dependennya. Unit analisis pada riset ini adalah organisasi karena menggunakan BPOM sebagai objek penelitian yang merupakan instansi pemerintahan. Responden dalam riset ini adalah petugas penyusun laporan keuangan pada satker di lingkungan BPOM. Analisis yang akan dipakai metode kuantitatif karena penelitian ini pertama-tama menetapkan hipotesis dan kemudian menggunakan teknik analisis statistik untuk mengujinya. Pengujian dilakukan dengan *software* SPSS. Nilai signifikansi ditetapkan sebesar 0,05 ($\alpha = 0,05$)

POPULASI DAN SAMPEL

Populasi penelitian adalah ASN pengelola anggaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPOM memiliki 43 satuan kerja yang terdiri dari 10 satuan kerja pusat dan 33 satuan kerja Balai Besar/Balai POM di Provinsi. Penetapan sampel penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pegawai yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan atau petugas SAI pada 43 satuan kerja di lingkungan BPOM. Menurut kriteria tersebut terdapat satu orang petugas SAI di setiap satker sehingga sampel yang akan digunakan sebanyak 43 responden.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian memakai jenis data primer yaitu data didapatkan langsung dari subjek penelitian. Data diperoleh melalui investigasi lapangan kepada subjek penelitian dengan menjawab kuesioner yang dibagikan. Kuesioner disebarikan melalui *google form* kepada sampel pada penelitian ini.

VARIABEL PENELITIAN

Kualitas laporan keuangan berperan sebagai variabel dependen pada penelitian yang dilakukan. Indikator kualitas laporan keuangan didasarkan pada PMK Nomor 270/PMK.05/2014, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan. Kuesioner dikembangkan dari penelitian Sudiarianti, dkk (2015) dan PP 71/2010, diukur dengan beberapa pertanyaan.

Variabel sistem pengendalian internal menggunakan kelima unsur SPIP sebagai indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Kuesioner merupakan pengembangan dari penelitian Sudiarianti, dkk (2015) dan PP 60/2018. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan karakteristik indikator adalah kemudahan penggunaan TI dan kegunaan. Kuesioner dikembangkan dari penelitian Tampubolon dan Ahmad (2019).

Kompetensi petugas SAI digunakan sebagai pemoderasi untuk menguji perannya dalam memodifikasi korelasi variabel independen terhadap variabel dependen. Keberadaan pemoderasi menguji apakah korelasi antar variabel semakin kuat atau semakin lemah. Pengukuran menggunakan dimensi pengetahuan, keahlian, dan perilaku. Kuesioner pengembangan dari penelitian Sudiarianti, dkk (2015).

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kualitas laporan keuangan pemerintah	a. Relevan	1. Kesesuaian dengan SAP 2. Memiliki <i>feedback value</i> 3. Pelaporan tepat waktu	Ordinal
	b. Andal	1. Penyajian kebenaran informasi dan pengungkapan peristiwa terkait 2. Informasi tidak bias 3. Informasi sesuai kebutuhan <i>stakeholder</i> 4. Informasi bersifat netral	
	c. Dapat dibandingkan	1. Keterbandingan antar periode 2. Kebijakan akuntansi berpedoman SAP	
	d. Dapat dipahami	1. Informasi jelas dan mudah dimengerti 2. Laporan keuangan sistematis	
Sistem Pengendalian Intern	a. Lingkungan pengendalian	1. Aturan perilaku 2. Standar kompetensi 3. Struktur organisasi 4. Ketepatan pembagian tugas 5. Sanksi pelanggaran kebijakan 6. Pemeriksaan tak terduga atas kas dan catatan akuntansi 7. Penilaian kualitas pengendalian internal	Ordinal
	b. Penilaian resiko	1. Kebijakan batasan resiko salah saji 2. Penerapan manajemen terhadap resiko salah saji	
	c. Kegiatan pengendalian	1. Otorisasi transaksi 2. SOP pengamanan aset	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Pendokumentasian transaksi 4. Pemahaman tujuan pengendalian internal 5. Pengembangan pengamanan infrastruktur 6. Pelaksanaan pengamanan peralatan dan persediaan 	
	d. Informasi dan Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan 2. Ketersediaan saluran komunikasi 3. Keterbukaan saluran komunikasi berkelanjutan 	
	e. Monitoring	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan BPK 2. Pelaksanaan reviu dan evaluasi temuan audit 	
Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Kemudahan penggunaan teknologi informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan perangkat komputer 2. Ketersediaan jaringan internet yang memadai 3. Penyusunan laporan keuangan telah memakai <i>software</i> 4. Aplikasi mudah dipelajari 5. Aplikasi sesuai kebutuhan 6. Aplikasi mudah dipahami 7. Aplikasi menggunakan keamanan data 	Ordinal
	b. Kegunaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi mempercepat penyelesaian tugas 2. Aplikasi meningkatkan kinerja 3. Aplikasi meningkatkan produktivitas 4. Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai SAP 5. Kegunaan aplikasi secara menyeluruh 	
Kompetensi Petugas SAI	a. Pengetahuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman pada tugas pokok dan fungsi 2. Pemahaman siklus akuntansi 3. Pemahaman PP Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP 	Ordinal
	b. Keahlian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menjurnal transaksi 2. Kemampuan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan benar 3. Pengembangan kompetensi 	
	c. Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Etika dan kode etik 2. Respon terhadap pelanggaran peraturan 3. Dukungan penerapan prinsip-prinsip akuntansi 	

HASIL PENELITIAN

Analisis deskriptif memberikan ilustrasi atau deskripsi suatu data yang dicermati dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, standar deviasi pada masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2018). Hasil uji analisis deskriptif sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Kategori
Sistem Pengendalian Intern	43	1,00	5,00	4,1233	0,73016	Tinggi
Pemanfaatan Teknologi Informasi	43	3,67	5,00	4,4128	0,46325	Tinggi
Kompetensi Petugas SAI	43	2,78	5,00	4,2248	0,49837	Tinggi
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	43	3,36	5,00	4,5624	0,44282	Tinggi
Valid N (Listwise)	43		5,00			Tinggi

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata penilaian responden terhadap sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi petugas SAI, dan kualitas laporan keuangan pemerintah termasuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa BPOM telah menerapkan sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi dengan baik, serta petugas SAI di BPOM memiliki kompetensi yang baik, sehingga laporan keuangan BPOM berkualitas.

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya pernyataan-pernyataan dalam kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji korelasi Pearson dengan nilai signifikansi 0,05. Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel, suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban atas pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Reliabilitas diukur menggunakan uji statistik alpha cronbach dengan dasar pengambilan keputusan, jika nilai *Cronbach's alpha* > 0,60, maka dinyatakan reliabel dan jika nilai *Cronbach's alpha* < 0,60, maka dinyatakan tidak reliabel. Hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Signifikan (α)	Kesimpulan	Variabel	Signifikan (α)	Kesimpulan
SPI_1	0,000	Valid	PTI_7	0,000	Valid
SPI_2	0,000	Valid	PTI_8	0,000	Valid

Variabel	Signifikan (α)	Kesimpulan	Variabel	Signifikan (α)	Kesimpulan
SPI_3	0,000	Valid	PTI_9	0,000	Valid
SPI_4	0,000	Valid	PTI_10	0,000	Valid
SPI_5	0,000	Valid	PTI_11	0,000	Valid
SPI_6	0,000	Valid	PTI_12	0,000	Valid
SPI_7	0,000	Valid	KSDM_1	0,000	Valid
SPI_8	0,000	Valid	KSDM_2	0,000	Valid
SPI_9	0,000	Valid	KSDM_3	0,000	Valid
SPI_10	0,000	Valid	KSDM_4	0,000	Valid
SPI_11	0,000	Valid	KSDM_5	0,000	Valid
SPI_12	0,000	Valid	KSDM_6	0,000	Valid
SPI_13	0,000	Valid	KSDM_7	0,000	Valid
SPI_14	0,000	Valid	KSDM_8	0,000	Valid
SPI_15	0,000	Valid	KSDM_9	0,000	Valid
SPI_16	0,000	Valid	KLKP_1	0,000	Valid
SPI_17	0,000	Valid	KLKP_2	0,000	Valid
SPI_18	0,000	Valid	KLKP_3	0,000	Valid
SPI_19	0,000	Valid	KLKP_4	0,000	Valid
SPI_20	0,000	Valid	KLKP_5	0,000	Valid
PTI_1	0,006	Valid	KLKP_6	0,000	Valid
PTI_2	0,001	Valid	KLKP_7	0,000	Valid
PTI_3	0,001	Valid	KLKP_8	0,000	Valid
PTI_4	0,000	Valid	KLKP_9	0,000	Valid
PTI_5	0,000	Valid	KLKP_10	0,000	Valid
PTI_6	0,000	Valid	KLKP_11	0,000	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Standar Realibilitas	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
Sistem Pengendalian Intern	0,60	0,969	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,60	0,891	Reliabel
Kompetensi Petugas SAI	0,60	0,850	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	0,60	0,949	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Dilakukan pengujian asumsi klasik bertujuan mencari tahu kepatasan pemakaian metode regresi berganda. Pengujian asumsi klasik data primer pada riset memakai uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Asumsi Klasik

UJI NORMALITAS KOLMOGOROV SMIRNOV			
Asymp. Sig. (2 tailed)	0,623	Terdistribusi Normal	
UJI MULTIKOLINEARITAS			
	Toleranc e	VIF	Kesimpulan
Sistem pengendalian intern	0,535	1,870	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan teknologi informasi	0,480	2,084	Tidak terjadi multikolinearitas
Kompetensi Petugas SAI	0,582	1,717	Tidak terjadi multikolinearitas
Sistem pengendalian intern*Kompetensi Petugas SAI	0,614	1,629	Tidak terjadi multikolinearitas
Pemanfaatan teknologi informasi*Kompetensi Petugas SAI	0,791	1,265	Tidak terjadi multikolinearitas
UJI HETEROSKEDASTISITAS			
	Signifikansi	Kesimpulan	
Sistem pengendalian intern	0,676	Tidak terjadi heteroskedastisitas	

Pemanfaatan teknologi informasi	0,106	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Kompetensi Petugas SAI	0,422	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Sistem pengendalian intern* Kompetensi Petugas SAI	0,690	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pemanfaatan teknologi informasi* Kompetensi Petugas SAI	0,062	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil pengujian hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Arah Uji	Unstandardized Coefficients	t	t tabel	Sig.	Kesimpulan
		B				
(Constant)		4,436	74,550	1,6871	0,000	
Sistem Pengendalian Intern (X1)	+	0,168	3,471	1,6871	0,001	Hipotesis diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	+	0,179	3,495	1,6871	0,001	Hipotesis diterima
Kompetensi Petugas SAI (X3)	+	0,146	3,148	1,6871	0,003	Hipotesis diterima
Sistem Pengendalian Intern*Kompetensi Petugas SAI	+	0,051	0,882	1,6871	0,384	Hipotesis ditolak
Pemanfaatan Teknologi Informasi*Kompetensi Petugas SAI	+	0,142	2,205	1,6871	0,034	Hipotesis diterima

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2021

Model persamaan regresi yang terbentuk berdasarkan hasil analisis adalah sebagai berikut:

$$VD = 4,436 + 0,168X1 + 0,179X2 + 0,146X3 + 0,051X1*X3 + 0,142X2*X3 + e$$

1. Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Nilai signifikansi variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,001, koefisien regresi bernilai 0,168, dan nilai t-hitung sebesar 3,471. Nilai signifikansi yaitu $0,001 < 0,05$ memperlihatkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Nilai t hitung sebesar

$3,471 > t$ tabel (1,6871) menunjukkan bahwa berarti sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan H_1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Akbariah dan Suratno (2018), Saraswati dan Budiasih (2019) serta Kewo dan Afiah (2017) yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern berdasarkan PP 60 tahun 2008 berperan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SPI penyusunan laporan keuangan perlu diimplementasi dengan baik oleh BPOM sesuai peraturan yang berlaku. BPOM telah memiliki kode etik pegawai, selain itu setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi telah memiliki standar kompetensi termasuk kompetensi untuk petugas SAI. Penyusunan laporan keuangan, BPOM juga memperhatikan risiko atas kemungkinan terjadinya penyimpangan dan salah saji. Monitoring dan evaluasi oleh Pimpinan BPOM dilakukan secara berkala merupakan upaya untuk melakukan perbaikan dan mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,001, koefisien regresi bernilai 0,179, dan nilai t-hitung sebesar 3,495. Nilai signifikansi yaitu $0,001 < 0,05$ memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Nilai t hitung sebesar $3,495 > t$ tabel (1,6871) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan H_2 diterima.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Budiono, dkk (2018), Sundari dan Mulyadi (2018) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai penggunaan perangkat komputer, *software*, jaringan, dan teknologi lainnya untuk memproses data guna menghasilkan informasi yang bermakna serta berkualitas, sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Proses penyusunan laporan keuangan BPOM telah dilakukan terkomputerisasi mengacu PMK nomor 215/PMK.05/2016 mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Setiap satuan kerja di BPOM telah difasilitasi *hardware*, jaringan internet, dan aplikasi laporan keuangan sesuai standar, sehingga mampu untuk mendukung percepatan penyelesaian tugas. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan laporan keuangan BPOM dilakukan untuk meminimalkan risiko kesalahan dan menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu, relevan, andal, dapat dibandingkan, serta mudah dipahami. Informasi keuangan yang berkualitas dapat membantu pengambilan keputusan strategis pemangku kepentingan.

3. Interaksi Sistem Pengendalian Intern dan Kompetensi Petugas SAI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Nilai signifikansi sistem pengendalian intern yang dimoderasi kompetensi sumber petugas SAI adalah 0,384, koefisien regresi bernilai 0,051, dan nilai t-hitung sebesar 0,882. Nilai t hitung sebesar $0,882 < t$ -tabel (1,6871) menunjukkan bahwa kompetensi petugas SAI tidak memperkuat pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan H_3 ditolak.

Hasil uji hipotesis H_3 terjadi disebabkan implementasi sistem pengendalian intern di BPOM telah dilakukan dengan baik. Penerapan sistem pengendalian intern mendukung tercapainya perolehan opini WTP atas laporan keuangan BPOM selama tahun 2016-2020. Kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan BPOM didasarkan pada sistem pengendalian intern, sehingga menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan SAP. Menurut penelitian

Nogueira dan Jorge (2017) pengendalian intern memiliki peran penting dalam mempersiapkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan, dengan memastikan legalitas dan kebijakan operasional sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas informasi keuangan dan efektivitas kegiatan manajemen. Penelitian Abbaszadeh, dkk (2019) juga menunjukkan bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap sistem pengendalian intern, yang artinya bahwa semakin baik implementasi teknologi informasi maka akan semakin baik pula sistem pengendalian intern sehingga informasi keuangan akan semakin andal. Dari penelitian-penelitian terdahulu disimpulkan ketika sistem pengendalian intern sudah berjalan dengan baik maka kompetensi sumber daya manusia tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh SPI terhadap kualitas laporan keuangan BPOM. Pada deskripsi responden berdasarkan jurusan pendidikan menunjukkan 60,50% petugas SAI berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga petugas SAI telah memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyusun laporan keuangan.

4. Interaksi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Petugas SAI terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Nilai signifikansi pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi kompetensi petugas SAI adalah 0,034, koefisien regresi bernilai 0,142, dan t-hitung sebesar 2,205. Nilai signifikansi yaitu $0,034 < 0,05$ menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi kompetensi petugas SAI berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Nilai t hitung sebesar $2,205 > t\text{-tabel}$ (1,6871) menunjukkan bahwa kompetensi petugas SAI memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan H_4 diterima.

Penelitian Setiawan, dkk (2021), Nirwana dan Haliah (2018), Saraswati dan Budiasih (2019) menghasilkan kompetensi pegawai berpengaruh positif signifikan kualitas laporan keuangan. Selain itu juga selaras dengan penelitian Budiono, dkk (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan. Variabel kompetensi petugas SAI yang memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi disebabkan karena petugas SAI di BPOM telah memiliki kompetensi yang memadai. Deskripsi responden memperlihatkan bahwa petugas SAI berdasarkan tingkat pendidikan sebesar 62,80% didominasi lulusan D4/S1, 60,50% petugas SAI berlatar belakang pendidikan akuntansi, dan memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun sebesar 39,50%. Hal ini mencerminkan bahwa petugas SAI di BPOM merupakan pegawai berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang memadai dan mampu memanfaatkan teknologi informasi. Teknologi informasi di BPOM telah tersedia di seluruh satuan kerja dan *user friendly*, sehingga mudah untuk dioperasikan oleh petugas SAI meskipun tidak memiliki latar belakang keilmuan akuntansi. Faktor tersebut yang menyebabkan kompetensi petugas SAI memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN

SIMPULAN

1. Sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan BPOM. Semakin baik penerapan sistem pengendalian intern di satuan kerja BPOM yang mencakup lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan BPOM.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan BPOM. Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik di lingkungan BPOM yang mencakup kemudahan dan kegunaan teknologi informasi, maka mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan BPOM.

3. Kompetensi petugas SAI tidak memperkuat pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan BPOM. Hal ini memperlihatkan bahwa kompetensi petugas SAI bukan merupakan faktor yang bisa memperkuat hubungan antara sistem pengendalian intern dengan kualitas laporan keuangan BPOM.

4. Kompetensi petugas SAI memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BPOM. Hal ini memperlihatkan bahwa kompetensi petugas SAI adalah faktor yang mampu memperkuat hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan kualitas laporan keuangan BPOM. Semakin tinggi kompetensi petugas SAI maka akan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga memperkuat peningkatan kualitas laporan keuangan BPOM.

KETERBATASAN

1. Distribusi kuesioner penelitian dilakukan pada bulan Desember 2021 yang merupakan akhir tahun anggaran berjalan, sehingga proses pengambilan data mengalami keterlambatan karena kapasitas pekerjaan petugas SAI sangat tinggi.

2. Data dalam penelitian hanya menggunakan metode survey melalui kuesioner, peneliti tidak melakukan wawancara kepada responden sehingga informasi yang didapatkan hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui penggunaan instrumen penelitian yang butir pertanyaan masih normatif.

3. Sampel penelitian tidak banyak yaitu terbatas pada 43 responden yang bertugas sebagai penyusun laporan keuangan pada 43 satuan kerja BPOM.

IMPLIKASI

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi BPOM dan satuan kerja baik pusat maupun daerah untuk melakukan peningkatan kinerja pelaporan keuangan. Evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengendalian intern yang sudah ada perlu dilakukan berkesinambungan untuk memitigasi risiko-risiko yang masih terjadi, seperti penyesuaian SOP di masa pandemi COVID-19. Perlunya memaksimalkan peran internal auditor dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan pendampingan penyusunan laporan keuangan di lingkungan BPOM.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi BPOM dan satuan kerja baik pusat maupun daerah untuk terus melakukan pengembangan terhadap pemanfaatan teknologi informasi dengan melakukan pembaharuan teknologi sesuai perkembangan kebutuhan pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memotivasi pengembangan kompetensi petugas SAI BPOM, melihat masih terdapat penyusun laporan keuangan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. GAP tersebut dapat diminimalisir dengan peningkatan kompetensi melalui pelatihan, sertifikasi, maupun bimbingan teknis sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan dalam tugas dan jabatan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mengembangkan penelitian di bidang pengelolaan keuangan negara maupun akuntansi sektor publik dengan mengangkat isu-isu terkini di masa depan.

SARAN

1. Bagi peneliti selanjutnya jika sampel penelitian adalah petugas penyusun laporan keuangan

sebaiknya pengambilan data tidak dilakukan pada akhir tahun anggaran berjalan.

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya metode pengumpulan data selain menggunakan instrumen kuesioner, jika melakukan wawancara kepada responden sehingga informasi yang didapatkan semakin spesifik.

3. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian dan memperbanyak sampel penelitian. Hal ini juga dapat disertai penambahan variabel penelitian seperti peran internal auditor, perubahan kebijakan selama pandemi Covid-19, dan sebagainya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penyelesaian artikel ilmiah ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus hati kepada:

1. Kedua orang tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan artikel ilmiah ini dengan baik.
2. Dr. Yolanda Masnita, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti.
3. Dr. Murtanto, S.E., Ak., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti serta selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia memberikan waktu dan tenaga untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam penyusunan artikel ilmiah ini sehingga dapat selesai dengan baik.
4. Seluruh Karyawan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah bersedia meluangkan waktu sebagai responden, memberikan informasi, dan memberikan dukungan kepada penulis.
5. Segenap Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat, serta kepada segenap staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti yang telah membantu proses administratif selama perkuliahan.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan artikel ilmiah ini.

REFERENSI

- Abbaszadeh, M. R., Salehi, M., & Faiz, S. M. (2019). Association of information technology and internal controls of Iranian states agencies. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 133-150. doi:<https://doi.org/10.1108/IJLMA-12-2017-0304>
- Akbariah, F., & Suratno. (2018). Sistem Pengendalian Internal, Sistem Akuntansi Instansi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Kualitas Laporan Keuangan di Kementerian Agama Provinsi Banten. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 37-52. doi:<https://doi.org/10.35838/jrap.2018.005.01.4>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020*. Jakarta.
- BPOM. (2020). *Laporan Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020*. Jakarta.
- Budiono, V. S., Muchlis, & Masri, I. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Pengalaman Kerja serta Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 13(2), 110-128. doi:<https://doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/13.2.02>
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Busro, M. (2018). *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2021). *Metode Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman Edisi 6*. Yogyakarta: BPFE.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *PMK Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*. Jakarta.
- Lathifah, N. (2021). *Konsep dan Praktik Sistem Pengendalian Internal*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nirwana, & Haliah. (2018). Determinant Factor of The Quality of Financial Statements and Performance of The Government by Adding Contextual Factors. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 28-40. doi:<https://doi.org/10.1108/AJAR-06-2018-0014>
- Nogueira, S. P., & Jorge, S. M. (2017). The Perceived Usefulness of Financial Information for Decision Making in Portuguese Municipalities (The importance of internal control). *Journal of Applied Accounting Research*, 18(1), 116-136. doi:10.1108/JAAR-05-2014-0052
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (t.thn.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. (2008). Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. (2010). Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. (2014). Jakarta.
- Prastiwi, N. J., & Mimba, N. S. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25(2), 1178-1204. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i02.p14>
- Rankin, M., Ferlauto, K., McGowan, S., & McGowan, P. (2018). *Contemporary Issues in Accounting* (2 ed.). Australia: Jhon Wiley and Sons.
- Saraswati, I. G., & Budiasih, I. N. (2019). Pengaruh Good Governance, Kompetensi SDM, dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 27(3), 2268-2292. doi:<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i03.p23>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. Chichester: John Wiley & Sons.
- Setiawan, J., Mulyani, S., Sueb, M., & Winarningsih, S. (2021). Influence of System Design with The Support of Staff Competencies on The Quality of Local Government Financial Reporting in Indonesia (Study on Local Governments in Java). *Academy of Strategic Management Journal*, 20(4), 1-15.
- Sundari, D., & Mulyadi, J. (2018). Kompetensi Pengelola Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan di Kementerian Pertahanan Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 5(1), 26-36. doi:<https://doi.org/10.35838/jrap.2018.005.01.3>
- Tambingon, H. N., Yadiati, W., & Kewo, C. L. (2018). Determinant Factors Influencing the Quality of Financial. *International Journal of Economics and Financial*, 8(2), 262-268.

- Tampubolon, F. M., & Basid, A. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 2549-2284.
- Triwahyudi, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang Berimplikasi pada Pencegahan Fraud pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3* (hal. 2.39.1-2.39.6). Jakarta: Universitas Trisakti.